

Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Ma'arif Wadaslintang

Eka Ariskawanti⁽¹⁾, Erni Munastiwi⁽²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: 12024092017@student.uin-suka.ac.id, 2erni.munastiwi@uin-suka.ac.id

Abstrak: Sistem manajemen pembiayaan pendidikan harus diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Perihal tersebut penting di perhatikan oleh masing-masing sekolah untuk memperoleh keaktifan alokasi dana pendidikan. Untuk memperoleh data, kegiatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sehingga memperoleh informasi yang relevan sejalan dengan lingkup dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan oleh kepala sekolah di SMA Ma'arif Wadaslintang sudah berjalan efektif dan akuntabel, searah dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Hal tersebut dibuktikan pada pengarahannya dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Pengarahan yang dilaksanakan yaitu dengan tiga cara diantaranya: 1) kepala sekolah tentu mengusahakan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan administrasi sekolah, 2) melaksanakan pengawasan/evaluasi kinerja bendahara, 3) memberikan motivasi kinerja. Bendahara menyatakan dalam mengadakan kelengkapan fasilitas tersebut kepala sekolah tidak hanya memberikan fasilitas berupa alat kinerja tetapi juga terkait kemajuan pengelolaan data-data. Kemudian pada upaya pengawasan, kepala sekolah melaksanakan pemeriksaan (auditing) keuangan. Pemeriksaan tersebut terdiri, pemeriksaan sistem pencatatan (accounting) dalam pengeluaran dan pemasukan dana pendidikan serta melakukan pengukuran kinerja tim keuangan sekolah. Jadi pengawasan kepala sekolah terhadap manajemen pembiayaan pendidikan adalah upaya untuk memeriksa, memantau, dan membimbing organisasi.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada : 01-07-2022

Disetujui pada : 16-07-2022

Dipublikasikan pada : 31-07-2022

Kata Kunci: Pengawasan, Kepala Sekolah, Manajemen Pembiayaan.

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i3.520

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran yang luas dalam memajukan kesejahteraan kehidupan. Aksi dan cita-cita berpondasi terhadap kemajuan kecerdasan bangsa. Aksi pendidikan tidak hanya ditargetkan melalui bentuk pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, namun pendidikan memiliki agenda-agenda yang luas untuk mewujudkan mutu yang lebih baik. Perbaikan mutu dalam lembaga pendidikan memberikan tanggapan baik bagi kehidupan sosial masyarakat, pemerintah, institusi penggerak pendidikan dan seluruh komponen pendidikan. (Amrullah Aziz, 2015). Terciptanya iklim yang baik dalam kondisi sosial, pendidikan dengan mutu yang baik tentu memiliki target ekonomi yang diupayakan untuk memperbaiki aspek pendidikan yang belum terpenuhi. Apriyanti Widiyansyah (2017) menyebutkan bahwa pendidikan adalah sumber yang mempengaruhi seluruh divisi pembangunan, hasil yang diperoleh adalah perkembangan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan output yang menuai tujuan pendidikan. Kualitas sumber daya manusia adalah hasil dari investasi pendidikan.

Maka dari hal tersebut mengarahkan bahwa pendidikan merupakan senjata untuk mensejahterakan kehidupan di suatu negara. Upaya pengadaan sumber dana dalam pendidikan terus di wujudkan untuk mencapai kesejahteraan dan harapan masyarakat. Faktor pendukung melalui program-program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah, dari waktu ke waktu terus mengalir dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya dengan keterbatasan biaya

(ekonomi). Senada dengan kutipan dari Nanang Nuryatna (2005) yang mengemukakan bahwa aktivitas pengadaan sumber pembiayaan pendidikan adalah menjadi modal yang menunjang pembangunan pendidikan. Pembangunan tersebut tentu ditargetkan untuk mempengaruhi kemajuan yang lebih baik dalam infrastruktur dan pola sistem yang diterapkan didalam suatu sekolah/madrasah. Melalui penyaluran dana yang di selenggarakan tersebut tentu seharusnya sekolah harus mengaktifkan pelaksanaan penggunaan dana hingga sampai laporan yang jelas, memilih pemanfaatan dana yang lebih minimalis dan mengusahakan pengadaan dana dari sumber lainnya agar lebih memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pendidikan.

Pelaksanaan penggalan dana pendidikan seharusnya diadakan melalui konsep/prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari peraturan terkait pendanaan pendidikan dalam UU. No.20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.(Akdon, Dedy Kurniady, & Deni Darmawan, 2015). Kebijakan tersebut mengarahkan suatu sekolah untuk mengadakan penggalan dana dari batasan-batasan yang tentu tidak ada tujuan untuk merugikan masyarakat. Jadi dukungan pelaksanaan juga didorong dari motivasi serta inovasi dari organisasi dan khususnya oleh seorang pemimpin (kepala sekolah). Dari penyelenggaraan pengadaan dana dari sumber lain atau selain dari pemerintah membutuhkan strategi-strategi yang khusus untuk memperoleh harapan yang telah direncanakan.

Melalui pernyataan-pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa dana (pembiayaan) dalam pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasarkan untuk mempertahankan dan menjalankan sistem dalam lembaga pendidikan. Sistem pendidikan memiliki ruang lingkup yang memberikan perhatian terhadap kegiatan yang aktif dilaksanakan. Pengawasan (*Controlling*) merupakan aktivitas manajemen yang termasuk kedalam (*management control system*). Sistem pengawasan/pengendalian adalah cara untuk mengetahui adanya masalah yang muncul dalam suatu institusi/organisasi. (Akdon,2011). Adapun kesimpulan oleh Hani Handoko (2018), dijelaskan bahwa pengawasan dalam fungsi manajemen adalah suatu aktivitas yang terstruktur, yang ditentukan melalui pengukuran-pengukuran kegiatan (dalam wujud pemeriksaan, mengoreksi, menemukan berbagai kesenjangan) proses kegiatan, kemudian digunakan sebagai sarana untuk menentukan kegiatan yang sesuai dan yang terbaik dari segi nilai efektivitas dan efisiensi. Jadi dengan demikian pengawasan merupakan peran yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh harapan yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Proses pengawasan menghubungkan aktivitas yang memunculkan notifikasi-notifikasi penting yang tidak sesuai/ kurang layak digunakan. Manajemen pembiayaan pendidikan secara tidak langsung didalamnya mempunyai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dengan kaitan pendanaan/pembiayaan pendidikan harus diselenggarakan secara khusus guna meningkatkan sistem prinsip-prinsip pengelolaan dan penggunaan dana dengan jelas dan benar-benar memenuhi kebutuhan dalam pendidikan.

Maka dari perihal diatas, peran pemimpin menjadi sorotan dalam mempengaruhi aktivitas pembiayaan dalam pendidikan. Pengawasan manajemen tentu tidak hanya ditargetkan pada bagian keuangan saja, tetapi upaya manajemen juga diandalkan pada seluruh komponen aktivitas didalam suatu lembaga pendidikan. Terlebih lagi pada sistem kinerja sumber daya manusia didalamnya. Aktivitas sumber daya manusia mendorong untuk mewujudkan tujuan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Scuhler bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah pemberi kontribusi dalam memberikan efektivitas kegiatan yang akan dilaksanakan melalui beberapa fungsi dan aktivitas yang bersifat manajerial.(Priyono,2007). Untuk mengatur (mengendalikan) suatu organisasi tentu membutuhkan seorang sosok pemimpin dalam memberikan motivasi-motivasi yang senada dengan tujuan yang akan dicapai.

Seperti yang dijelaskan oleh Gibson bahwa kepemimpinan adalah cara untuk mempengaruhi para karyawan tanpa menggunakan paksaan dalam memberikan

motivasi melalui ungkapan komunikasi yang memunculkan semangat bagi karyawan atau anggota organisasi. Jadi pada kesimpulannya seorang pemimpin atau kepala sekolah berwenang untuk melakukan berbagai motivasi dan pengawasan pada kinerja SDM (organisasi). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam memajukan kualitas lembaga pendidikan. Sejalan dengan ungkapan Abdul & Saiful (2017) dalam kutipannya membahas bahwa dalam suatu organisasi kepala sekolah merupakan pemegang kekuasaan yang paling berhak dalam mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas seluruh tenaga pendidik atau kependidikan didalam sekolah. Setiap kepala sekolah (pemimpin) tentu mempunyai gaya kepemimpinan dengan khas berbeda dalam mengatur organisasinya.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan yang diimplementasikan dengan berlandaskan pada kedisiplinan. Kedisiplinan yang dimaksud tersebut harus terstruktur dan teliti dalam mengelola dana didalam lembaga pendidikan. Berdasarkan riset dana merupakan pengelolaan yang bersifat sensitif, jadi model dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan tentu harus diselenggarakan secara detail dan akuntabilitas. Akuntabilitas salah satu cara untuk mempertahankan kondisi organisasi dalam melaksanakan kinerjanya. Jadi pertanggung jawaban juga berunsur dari kode etik (kebijakan) yang ditentukan dari pemimpin organisasi atau pemerintah pusat. Jadi akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas (kejujuran) atas tanggung jawab kinerja pada masing-masing bidang yang dikelola dalam pembiayaan pendidikan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan.(Nor Mubin,2018). Adanya kedisiplinan dalam manajemen pembiayaan pendidikan tentu membimbing organisasi dalam menaati kebijakan dan memperkuat pertanggung jawabannya terhadap sistem keuangan yang dikelola.

Jadi dari pernyataan diatas manajemen pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan keuangan dan membentuk instrumen administrasi yang diperoleh lembaga pendidikan dengan integrasi (pemanfaatan) sumber keuangan secara efektif sehingga memaksimalkan kegiatan pendidikan. Jadi sistem manajemen ini dilaksanakan oleh pemimpin yang nantinya akan menggerakkan seluruh organisasi dalam mengimplementasikan fungsi manajemen dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari: 1) perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan dalam aktivitas pengeluaran dana (pencairan), 3) penggunaan, 4) pencatatan, 5) pengendalian, 6) penyimpanan, dan 7) pertanggungjawaban dalam pelaporan (auditing) keuangan.(Arwildayanto, Nina Lamatenggo, & Warni,2017). Kegiatan tersebut tentu juga harus aktif memilah kegiatan yang lebih penting, dan melaksanakan penghematan untuk mengantisipasi pembiayaan yang mendesak dan yang tidak terduga.

Jadi melalui rancangan aktivitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang telah disebutkan, tentu kepala sekolah harus mempunyai kebijakan dalam memperkuat petanggungjawaban dari setiap anggota organisasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan penjelasan yang telah diutarakan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pengawasan kepala sekolah terhadap manajemen pembiayaan pendidikan. Untuk mengetahui unsur apa saja yang ditindak lanjuti oleh kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan dalam pembiayaan pendidikan, sehingga keaktifan organisasi berjalan dengan profesional dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam kinerjanya.

METODE

Penelitian yang dijalankan yaitu dengan melalui metode penelitian kualitatif, yang selanjutnya akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan peneltian yang menjelaskan berbagai fakta sosial. Tujuan dari metode penelitian ini juga membangun adanya inovasi peneliti, pola pikir dan rancangan yang diperoleh dari spesifikasi-spesifikasi nilai fenomena pada fakta sosial.(Sugiyono,2020). Penelitian dekriptif menurut Hidayat Syah disebutkan bahwa peneltian ini mempunyai aturan tanpa terbatas untuk menemukan berbagai fakta, fenomena yang terjadi dilapangan, dalam artian penelitian dekriptif merupakan penelitian yang berusaha

mencari secara dalam dari berbagai dimensi dari masalah yang terjadi. (Samsu, 2017). Dengan demikian peneliti melaksanakan penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Metode penelitian tersebut merupakan alat untuk mendukung pelaksanaan penelitian dalam kualitatif. Metode wawancara merupakan metode untuk memperoleh fakta dari narasumber/responden. Selanjutnya pada tahap observasi, dimana dalam tahap ini penting bagi peneliti mengetahui fenomena yang sebenarnya terjadi di objek penelitian. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode dokumentasi, metode ini mendukung untuk membuktikan fakta dan fenomena yang diperoleh dari responden dan kondisi, aktivitas yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilaksanakan.

Subyek penelitian yang menjadi tujuan utama memperoleh informasi yaitu Kepala Sekolah, Staff Tata Usaha Sekolah, Bendahara Sekolah dan Guru SMA Ma'arif Wadaslintang. Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian yaitu melalui prosedur dalam penelitian kualitatif. Tujuan analisis data yaitu untuk mengorganisasikan bagian-bagian yang dianggap penting untuk memperoleh hasil yang relevan dalam kriteria penelitian. Umar Shidiq & Moh. Miftachul Choiri (2019) menjelaskan bahwa analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. Upaya metode penelitian yang dilaksanakan yaitu untuk memperoleh berbagai opini, nilai positif, dan perkembangan hasil penelitian yang harapannya dijadikan inovasi bagi pengembangan pendidikan.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Manajemen Pembiayaan dan Sumber Pembiayaan Pendidikan Pendidikan di SMA Ma'arif Wadaslintang

Pengadaan sumber dana bagi lembaga pendidikan merupakan pelaksanaan yang sangat penting untuk melengkapi berbagai peraga dalam wilayah akademik pendidikan. Untuk membangun mutu pendidikan tentu sangat membutuhkan dukungan jasa dan pendanaan dalam mengusahakannya. Maka dengan demikian setiap lembaga pendidikan berperan wajib untuk mengadakan pendanaan, dan tentu cara dan skill dari masing-masing sekolah tidak sama antara cara dan perolehan yang dimiliki. Kepala sekolah sebagai pemimpin tentu menjadi seseorang yang mengarahkan dalam perihal tersebut. Dengan adanya keterlibatan masyarakat terhadap keaktifan pembiayaan pendidikan tentu belum memenuhi kebutuhan pendidikan secara menyeluruh, hal tersebut menyangkut dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berbeda-beda dalam mengusahakan pendidikan bagi putra dan putrinya.

Inovasi kepala sekolah dalam menggali sumber dana pendidikan yaitu dapat bersumber dari kompetensi kepala sekolah. Marlina Siregar dkk (2020) dalam kutipannya menjelaskan lima kompetensi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah yaitu: 1) kompetensi kepribadian, 2) kompetensi manajerial, 3) kompetensi kewirausahaan, 4) kompetensi supervisi dan 5) kompetensi sosial. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Kompetensi-kompetensi tersebut mempunyai tujuan untuk membawa kemajuan sekolah agar berdayaguna secara efektif, kepala sekolah sudah sewajarnya harus siap menerima suatu kondisi yang menuai masalah di lingkungan lembaganya, dan hubungan kompetensi kewirausahaan kepala sekolah sangat tepat untuk menumbuhkan perekonomian dalam suatu lembaga pendidikan.

Nur Komariah (2017) juga menegaskan bahwa jiwa kewirausahaan (entrepreneur) kepala sekolah diwujudkan melalui visi dan misi, tujuan, dan rencana strategis sekolah secara realistis, sesuai dengan kemampuan, kondisi dan mampu memanfaatkan sumber daya atau organisasi dibawahnya untuk mendukung tercapainya visi sekolah. Jadi peran kepala sekolah dalam membangun kewirausahaan sekolah menurut penulis dapat dipelajari sebagai alat untuk

membimbing seluruh warga sekolah. Upaya yang dilaksanakan tentu harus dapat dibudidayakan dengan melihat karakteristik kondisi sosial lingkungan sekolah. Jadi selain memberikan tambahan nilai sumber dana pendidikan, peran kewirausahaan didalam lingkungan pendidikan dapat menjadi media membimbing kemandirian sekolah dan pelajaran sosial bagi warga sekolah.

Lingkungan wilayah lembaga pendidikan SMA Ma'arif Wadaslintang merupakan Madrasah Aliyah swasta di kecamatan Wadaslintang kabupaten Wonosobo. Madrasah ini berdiri dari yayasan LP Ma'arif. Dalam sistem penggalan/pengadaan sumber dana pendidikan kepala sekolah mengungkapkan bahwa penarikan sumbangan operasional pendidikan dari masyarakat atau orang tua siswa mulai tahun 2021 tidak diberlakukan. Kebijakan tersebut di agendakan oleh kepala sekolah untuk meringankan wali murid. Pasalnya adanya pandemi memberikan kendala dalam segi ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut diberlakukan melalui sosialisasi dengan wali murid terlebih dahulu, dan sejauh impleemntasi tersebut diterapkan sistem pendidikan masih berjalan efektif. Sebelum adanya perubahan tersebut dana yang ditetapkan untuk SOP yaitu senilai Rp 75.000,00. Penarikan biaya lain hanya melalui infaq dari siswa yang dijalankan dengan keikhlasan.

Kepala sekolah menjelaskan sumber dana diperoleh melalui BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), dan sumbangan dari donatur pendidikan atau kerjasama mitra yayasan. Di SMA Ma'arif Wadaslintang BOS turun dengan 4 kali periode yaitu 3 bulan sekali dalam kurun waktu satu tahun. Kepala sekolah juga mengungkapkan bahwa upaya pengawasan BOS dilaksanakan dengan upaya perancangan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang kemudian realisasi dana tersebut sesuai dengan kebutuhan keuangan sekolah. Realisasi lebih ditargetkan pada skala prioritas yang harus lebih terkondisikan. Laporan rancangan tersebut juga teratur dilaksanakan oleh bendahara, yang kemudian juga memudahkan kepala sekolah untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan sekolah.

Jadi dari hasil penelitian di SMA Ma'arif Wadaslintang menunjukkan bahwa pengadaan sumber biaya pendidikan belum di generasikan melalui kewirausahaan sekolah. Penggalan dana masih berunsur secara umum yaitu melalui pemerintah dan masyarakat. Bendahara memaparkan bahwa perencanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMA Ma'arif Wadaslintang diantaranya sebagai berikut: 1) diawali dengan menyusun planning anggaran, 2) menyusun rencana prioritas kerja/penetapan program, 3) membuat analisis biaya dan sumber dana, dan 4) membuat rencana implementasi keuangan.

Pengorganisasian kinerja atau penugasan dalam menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Ma'arif Wadaslintang dilaksanakan secara struktural. Pengorganisasian tersebut terdiri dari : 1) penanggung jawab berperan untuk mengawasi dan memonitoring implementasi pembiayaan pendidikan, 2) ketua, melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan, 3) Bendahara dalam pengeluaran biaya dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis, 4) sekretaris, membantu pengolahan adminitrasi yaitu dalam laporan pengeluaran dana dan pencatatan pendapatan dana sekolah, dan 5) anggota membantuiimplementasi sistem keuangan.

Pada tahap pelaksanaan tim penyusun program keuangan SMA Ma'arif Wadaslintang melaksanakan perencanaan pada 4 model yang sudah ditetapkan diatas. Dalam pelaksanaan yaitu menindaklanjuti rencana anggaran yang sudah mempunyai program pada penetapan rencana. Kemudian tahap yang dilakukan untuk mengevaluasi dana yang telah tetap sasaran yaitu dilaksanakan perbandingan antara perencanaan dan kondisi keuangan melalui rapat komite. Sehingga dari kegiatan tersebut akan memperoleh tindak lanjut dan hasil yang lebih relatif untuk pemanfaatan dana yang lebih fleksibel.

B. Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Ma'arif Wadaslintang

Penyelenggaraan penggunaan dana pendidikan harus mengikuti prinsip - prinsip yang tepat, karena prinsip yang tepat dapat mengefektifkan dan mengarahkan sistem manajemen keuangan pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan dan implementasi proses kegiatan belajar bagi peserta didik sangat membutuhkan andil pendanaan didalamnya, senada dengan yang diungkapkan oleh Tria Zuliatul (2020) yang menerangkan bahwa indikator pengelolaan pembiayaan pendidikan yang profesional yaitu memiliki sistem penggalian dana dan penyaluran dan penggunaan dana secara terukur, termanaj, dan tentunya terpantau dengan baik. Selanjutnya dalam kutipannya juga menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan pendidikan merupakan tanggung jawab bendahara madrasah. Dan dalam evaluasi pelaksanaannya yaitu si awasi oleh kepala madrasah.

Memantau atau mengevaluasi pembiayaan pendidikan merupakan satu upaya mengukur sejauh mana untuk menemukan titik operasional yang terkendala atau kurang maksimal dalam realisasi pembiayaan pendidikan. Mengevaluasi merupakan bagian fungsi manajemen yang sering disebut juga dengan controlling. Jadi mengontrol pengeluaran biaya dan pemasukan biaya pendidikan yang diperoleh oleh suatu sekolah/madrasah.

Pengawasan keuangan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah merupakan salah satu agenda supervisi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sekaligus motivasi kinerja tenaga kependidikan didalam madrasah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekaligus seorang manajer dalam merancang aktivitas keuangan pendidikan harus melandaskan jiwa-jiwa profesional kepada bawahannya. Jamaludin Iskandar (2019) memaparkan, pengawasan yang diberikan oleh kepala sekolah secara internal didalam suatu sekolah, dengan didalamnya terdapat upaya mengevaluasi dan memeberikan pemahaman terhadap setiap penanggung jawab tentang pengeluaran dan kebutuhan sekolah dalam lingkup pembiayaan. Dalam langkahnya kepala sekolah memonitoring serta membimbing organsasi didalam manajemen pembiayaan pendidikan. Tentu dari pernyataan tersebut kepala sekolah menjadi pemegang tanggung jawab yang harus kuat memajukan pertahanan dalam pencapaian sasaran yang tepat, terlebih lagi pada pelaksanaan pemanfaatan keuangan pendidikan. Sasaran yang akan diperoleh tentu akan mengefektifkan gerakan kemajuan pembaga pendidikan.

Suyati (2020) menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh sekolah dalam kurun waktu tertentu. Karena kepala sekolah sebagai otorisator (pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan tindakan sebagai penerimaan dan pengeluaran anggaran) dan diamanati sebagai koordinator (penjabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan dilakukan berdasarkan kebijakan yang berlaku). Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah merupakan pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan tindakan realisasi keuangan dan mendelegasikan aktivitas kuangan pendidikan kepada tenaga kependidikan dengan memberikan pada batas-batas aturan yang didtetapkan oleh pemerintah. Dalam setiap pengadaan dari sumber pendanaan yang diperoleh lembaga pendidikan mempunyai kebijakan masing-masing yang harus dipenuhi sekolah atau madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan di SMA Ma'arif Wadaslintang menunjukan berbagai pola pengawasan kepala sekolah dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Bendahara sekolah menyatakan bahwa upaya kepala sekolah untuk mengarahkan setiap tenaga pengelola adminitrasi atau bendahara yaitu dilakukakan dengan beberapa cara yaitu diantaranya : 1) kepala sekolah tentu mengusahakan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan adminitrasi sekolah , 2) melaksanakan pengawasan/evaluasi kinerja bendahara, 3) memberikan motivasi kinerja. Bendahara menyatakan dalam mengadakan

kelengkapan fasilitas tersebut kepala sekolah tidak hanya memberikan fasilitas berupa alat kinerja tetapi juga terkait kemajuan pengelolaan data-data. Misalnya kemajuan pengolahan data online sesuai dengan peraturan dari pusat.

Kepala menerangkan pada tahap pengawasan pengelolaan keuangan kepala sekolah melaksanakan pemeriksaan (auditing) keuangan. Pemeriksaan tersebut terdiri, pemeriksaan sistem pencatatan (accounting) dalam pengeluaran dan pemasukan dana pendidikan serta melakukan pengukuran kinerja tim keuangan sekolah. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Miftahol Arifin (2016), menjelaskan bahwa seorang ketua pengurus/kepala sekolah harus melaksanakan pemantauan dan menilai hasil melalui pelaksanaan auditing. Auditing terdiri dari tiga jenis, diantaranya yaitu: 1) audit pada laporan keuangan, audit laporan keuangan yaitu diperankan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara integral dari informasi yang terukur melalui verifikasi dari kriteria-kriteria tertentu, 2) audit operasional, yaitu dilaksanakan untuk menelaah bagian prosedur dan metode operasi organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan, dan 3) auditing ketaatan, yaitu cara pemeriksaan dengan memastikan apakah sistem keuangan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Dari hal diatas kepala sekolah tentu tidak hanya sendiri dalam memberikan sosialisasi kemajuan yang dilakukan. Dalam pengawasan tentu hal pokok yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang ada dalam pelaksanaan realisasi dan pendidikan. Kepala sekolah mengungkapkan dalam motivasi kinerja masih dilakukan dengan cara yang sederhana. Sebagai sekolah swasta sumber pendapatan di SMA Ma'arif Wadaslintang belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik. Hal tersebut diungkapkan karena insentif merupakan fasilitas yang pokok yang mempengaruhi nilai motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Insentif yang diberikan tidak hanya berupa materi, insentif yang lain dalam perihal penghargaan bagi pola kinerja bendahara.

Kepala sekolah juga menyatakan dalam motivasi kinerja yang dilaksanakan memberikan kemajuan dedikasi tenaga pendidik di SMA Ma'arif Wadaslintang. Motivasi selanjutnya yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yaitu dengan mempertahankan nilai kekompakan organisasi. Kekompakan organisasi sangat membantu mengefektifkan suasana kinerja didalam suatu lembaga atau instansi. Suminah, Nurkholis & Fenny (2020:80) dalam penelitiannya menyatakan bahwa suatu kinerja (performancy) merupakan indikator yang mendorong munculnya budaya organisasi. Indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap nilai kekompakan dalam suatu organisasi. Di dalam budaya organisasi membawa nilai kedisiplinan bagi organisasi. Jadi pendapatan finansial yang diperoleh oleh pegawai atau bendahara tidak mempengaruhi sistem motivasi yang diperoleh dari sekolah. Motivasi tentu diperlukan dalam proses pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk lebih aktif dalam memberikan suatu kebijakan. Bendahara mengungkapkan seluruh pengelolaan biaya pendidikan di SMA ma'arif Wadaslintang diatas kewenangan kepala sekolah.

Dalam pengelolaan tata tertib bagi bendahara, kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa sistem kedisiplinan pembiayaan pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis dari dinas provinsi. Sistem tersebut diadakan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan. Jadi setiap kebijakan yang diberlakukan pasti terdapat sanksi apabila terjadi pelanggaran dari bendahara. Kemudian pengukuran kinerja pada tenaga administrasi atau bendahara diukur melalui job description dengan petunjuk sistem informasi keuangan provinsi.

KESIMPULAN

Pengawasan manajemen keuangan pendidikan merupakan upaya mengukur kinerja dan memperoleh stabilitas proses pengelolaan keuangan. Kepala sekolah sebagai tumpuan tanggung jawab terbesar dalam aktivitas pemanfaatan dana dalam pendidikan seharusnya lebih bijak dan tegas dalam membimbing

tim/organisasinya. Dalam menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan, SMA ma'arif Wadaslintang mengimplementasikan nilai manajemen dari perencanaan sambai monitoring evaluasi). Sumber dana pendidikan yang diperoleh yaitu melalui pemerintah dan masyarakat. Adapun upaya sekolah dalam mengarahkan setiap tenaga pengelola adminitrasi atau bendahara yaitu dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya : kepala sekolah tentu mengusahakan kelengkapan fasilitas yang berhubungan dengan adminitrasi sekolah ,melaksanakan pengawasan/evaluasi kinerja bendahara, memberikan motivasi kinerja. Kemudian dari segi pengawasan kepala sekolah dalam manajemen pembiayaan pendidikan ditargetkan melalui pemeriksaan (auditing) keuangan. Pemeriksaan tersebut terdiri, pemeriksaan sistem pencatatan (accounting) dalam pengeluaran dan pemasukan dana pendidikan serta melakukan pengukuran kinerja tim keuangan sekolah. Jadi pengadaan dana di SMA Ma' arif Wadaslintang masih diselenggarakan secara umum dan belum di wujudkan melalui target yang lebih strategis. Pengarahan dan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan didalam pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di SMA Ma'arif Wadaslintang mampu meningkatkan nilai efektifitas dan akuntabilitas searah dengan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahmat dan Syaiful Kadir. 2017. *Kepemimpinan Pendidikan dan Budaya Mutu*, (Yogyakarta:Zahir Publishing).
- Akdon. (2015). Dedy Kurniady, dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya)
- Akdon. 2011. *Strategic Management For Eduvation Mangement*, (Bandung:Alfabeta).
- Amrullah Aziz. (2015). *Peningkatan Mutu Pendidikan*, Jurnal Panca Wahana (Jurnal Studi Islam), Vol.10. No.2.
- Apriyanti Widiensyah. 2017. *Peran Ekonomi Dalam Pendidikan dan Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Cakrawala, Vol.17. No.2.
- Arwildayanto, Nina Lamatenggo, dan Warni. 2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*.(Bandung:WidyaPadjadjaran Anggota IKAPIJABAR)
- Besse Marhawati. 2018. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, (Deepublish).
- Jamaludin Iskandar. 2019. *Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan*. Jurnal Idaarah. Vol.3. No.1.
- Marlina Sregar dkk. 2020. *Pengaruh Perilaku Inovatif terhadap Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Labuhan Batu*, Vol4. No.2.
- Miftahol Arifin. 2016. *Manajemen Keuangan Pondok Pesantren*. Jurnal Penddikan dan Manajemen Islam.Vol.4 No.2.
- Nanang Nuryatna. 2005. *Alternatif dan Strategi Penggalan Dana Pendidikan di Indonesia (Kajian Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, Jurnal El Tarbawi , Vol.7 No.8.
- Nor Mubin. 2018. *Integritas dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah*, Jurnal Attaqwa, Vol.14, No.2.
- Nur Komariah. 2017. *Kepemimpinan Entrepreneurship Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Sekolah*.Vol.5. No.1
- Priyono. 2007. *Pengantar Manajemen*, (Sidoarjo:Zofatama Publisher).
- Samsu. 2017. *Metode Peneltian: (Teori dan Aplikasi Peneltitan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research &Development)*, (Jambi:Pusaka).
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfa Beta).
- Suminah, Nurkholis & Fenny. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi Sekolah Dan Supervisi Akademik Terhadap Kinerja Guru Sd Negeri Se-Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*. Jurnal Manajemen Pendidikan.Vol.9 No.1
- Suyati. 2020. *Tata Kelola Keuangan Sekolah*. Jurnal Kependidikan Islam. Vol. 10. No.1.

- Tria Zuliatul Faizah. 2020. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Mi Raudlatul Muta'allimin. [Http://Eprints.Umsida.Ac.id/6620/](http://Eprints.Umsida.Ac.id/6620/). Di akses 18 Mei 2022.
- Umar Shidiq & Moh.Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo:Nata Karya).